

2. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Konsep

Konsep adalah sesuatu yang dikonsepsikan. Konsep juga berarti rancangan, idea tau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Konsepsi adalah pendapat, rancangan cita-cita yang telah dipikirkan.

Pemberdayaan sebagai konsep dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pemberdayaan berarti pembangunan kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap sumber daya alami dan pengelolaanya secara berkelanjutan (Pranarka, 63:65).

Selanjutnya dikemukakan bahwa melek huruf dapat diinterpretasikan sebagai sumber pemberdayaan masyarakat. Melek huruf memberikan akses terhadap pengetahuan tertulis yang dapat di anggap sebagai suatu kekuatan. Berkaitan dengan isu jender; konsep pemberdayaan memandang pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria.

Pemberdayaan adalah alat untuk mencapai tujuan (*means to an end*) untuk memperkuat kapasitas organisasi/kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Isu utama tentang pemberdayaan dalam pembangunan, Chambers dalam bukunya *Rural Development Putting the last first* (1983 : 113-114) menyampaikan konsep “perangkat depriasi” (*concept of deprivation trap*) yang menganalisis penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*power lessness*), kerapuhan (*ulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Ada keterkaitan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkat yang lain. Ketidak berdayaan membatasi akses terhadap sumber daya Negara. Memperunit keadilan hukum bagi penyelewengan, menyebabkan hilangnya kekuatan tawar menawar, membuat rakyat semakin rapuh dalam berhadapan dengan kekuasaan lain. Akhirnya dikatakan

bahwa situasi ketidakberdayaan itu dapat diatasi dengan “enabling and empowering the poor”, yang merupakan upaya penting karena kemiskinan bukan merupakan kondisi alamiah semata-mata melainkan suatu proses pengingkaran pemberdayaan secara social, ekonomi dan politis.

Pendapat Chambers diperkaya oleh Kabeer, yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan bukan menunjuk pada ketidakberdayaan kekuatan sama sekali. Dalam realitas, mereka yang tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahan dan bahkan mampu untuk menggulingkan. Oleh karenanya kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk di tampilkan dan dikembangkan. Menurut pandangan ini, kekuasaan dapat dibedakan dalam dua dimensi :

- a. Dimensi distributif kekuasaan, yaitu sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain.
- b. Dimensi generative kekuasaan, yang merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri.

Dengan mengacu pada kekuasaan generative maka dapatlah diciptakan melalui organisasi social dan kelompok kaum marginal kekuatan untuk mendorong proses perubahan social yang memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka pada tingkat local maupun nasional.

Anggapan yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya mempunyai dimensi distributif memandang sebagai dimensi yang bervolume tetap dan akan melihat sedikit kemungkinan untuk bertindak cooperative. Pemegang kekuasaan cenderung menentang dan mengantisipasi secara negatif inisiatif organisasi.

Sedangkan dimensi generative kekuasaan menunjukkan adanya kemungkinan bahwa semua anggota masyarakat atau unit social yang lain mengambil keuntungan dan bertambahnya kekuasaan apabila peningkatan dibagi secara luas dalam kelompok. Akhirnya disimpulkan bahwa secara praktis dalam usaha menciptakan pemberdayaan perlu dimunculkan suatu gabungan dari aspek kekuasaan distributif maupun kekuasaan generative.

Menurut konsep John Friedman, pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap j tangga yang menyangkup tiga hal.

- a. Pemberdayaan social ekonomi yang difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap tangga dalam proses produksi seperti akses informasi, pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi social dan akses kepada sumber-sumber keuangan.
- b. Pemberdayaan politik difokuskan kepada upaya menciptakan akses bagi setiap j tangga ke dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas proses pemilihan umum, akan tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan kolektif atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik, gerakan social atau kelompok kepentingan.
- c. Pemberdayaan psikologis difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap j tangga yang lemah. Kepercayaan diri pada hakrkatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan social ekonomi dan pemberdayaan politik.

Sumber :

(Buku : Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR)